

**Kantor Wilayah
Kementerian Hukum
dan HAM NTT satker
Setjend**

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2021

Jl. W.J.Lalamentik no 98

Kupang_NTT

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur (SETJEN) adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur (SETJEN) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur (SETJEN). Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kupang, 30 Juni 2021

Kepala Kantor Wilayah



Marciana D. Jona, SH
NIP. 19641126 199103 2 001

DAFTAR ISI

Hal	
Kata Pengantar	1
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	10
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	10
A.3. Basis Akuntansi	11
A.4. Dasar Pengukuran	11
A.5. Kebijakan Akuntansi	11
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
B.1. Pendapatan	17
B.2. Belanja	17
B.2.1 Belanja Pegawai	18
B.2.2 Belanja Barang	19
B.2.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	21
C.1. Persediaan	21
C.2. Tanah	21
C.3. Peralatan dan Mesin	21
C.4. Gedung dan Bangunan	22
C.5. Aset Tetap Lainnya	23
C.6. Akumulasi Penyusutan Tetap	23
C.7. Aset Tak Berwujud	24
C.8. Aset Lain-Lain	24
C.9. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	25
C.10. Pendapatan Diterima di Muka	25
C.11. Ekuitas	25
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	26
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	26
D.2. Beban Pegawai	26
D.3. Beban Persediaan	26
D.4. Beban Barang dan Jasa	26
D.5. Beban Pemeliharaan	26
D.6. Beban Perjalanan Dinas	26
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	26
D.8. Surplus dari Kegiatan Non Operasional	26
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	27
E.1. Ekuitas Awal	27
E.2. Surplus (Defisit) LO	27
E.3. Koreksi Penyesuaian Tahun Berjalan	27
E.4. Koreksi Nilai Persediaan	27
E.5. Koreksi Nilai Tetap Aset	27

E.6. Ekuitas Akhir	27
F. Pengungkapan – Pengungkapan Lainnya	28
F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	28
F.2 Pengungkapan Lain-lain	28
F.3 Temuan dan Tindak Lanjut BPK	28
F.4 Rekening Pemerintah	28
Laporan-Laporan Pendukung	
Neraca Percobaan	
Laporan Operasional	
Laporan Perubahan Ekuitas	
Neraca	
Laporan Realisasi Anggaran	
Laporan Realisasi Anggaran Belanja	
Laporan Realisasi Pengembalian Belanja	
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah	
Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah	
Lampiran / Data Dukung	


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur (SETJEN) yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kupang, 30 Juni 2021

Kepala Kantor Wilayah



Marciana D. Jone, SH
NIP. 19641126 199103 2 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur (SETJEN) Tahun Anggaran 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode, 01 Januari 2021 dan 30 Juni 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp. 41.402.261,-** atau sebesar 0 persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 0,-**

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp. 8.254.279.925,-** atau mencapai 39.63 persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 20.827.600.000,-**

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Tahun 2021

Nilai Aset per, 30 Juni 2021 dicatat dan disajikan sebesar **Rp. 74.492.739.405,-** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp. 183.860.098,-**, Aset Tetap sebesar **Rp. 68.990.185.612,-** dan Aset Lainnya (Neto) sebesar **Rp. 5.318.693.695,-**

Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar **Rp. 74.492.739.405,-** yang berupa kewajiban sebesar **Rp. 150.000.000,-** dan Ekuitas sebesar **Rp. 74.342.739.405,-**

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2021 adalah sebesar **Rp. 3.484.138,-** sedangkan jumlah beban adalah sebesar **Rp. 9.057.760.011,-** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp. (9.054.275.873),-**. Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya dan beban dari kegiatan non operasional lainnya masing-masing sebesar **Rp. 37.918.123,-** dan **Rp. 0,-** sehingga Surplus dari kegiatan non operasional sebesar **Rp. 37.918.123,-** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **Rp. (9.016.357.750),-**

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal adalah sebesar **Rp. 75.726.693.906,-** dikurangi Defisit-LO sebesar **Rp. (9.016.357.750),-** kemudian dikurangi dengan Koreksi Atas Reklasifikasi **Rp. 0,-**, Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar **Rp. 0**, Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi **Rp. 0,-** serta ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp. 7.632.403.249,-** sehingga Ekuitas Akhir entitas pada tanggal, 30 Juni 2020 adalah senilai **Rp. 74.342.739.405,-**

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
NUSA TENGGARA TIMUR (SETJEN)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Untuk Periode Yang Berakhir Pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun Anggaran 2021		% Terhadap Anggaran	Tahun Anggaran 2020	
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	Realisasi
PENDAPATAN						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	41.402.261	0,00		18.566.685
JUMLAH PENDAPATAN		-	41.402.261	0,00		18.566.685
BELANJA	B.2.					
Belanja Operasional						
Belanja Pegawai	B.3	9.761.484.000	5.359.532.435	54,90		4.334.165.798
Belanja Barang	B.4	5.588.075.000	2.721.414.990	48,70		1.886.493.664
Belanja Modal	B.5	5.478.041.000	173.332.500	0,00		152.910.250
Jumlah Belanja Operasi		20.827.600.000	8.254.279.925	39,63		6.373.569.712
JUMLAH BELANJA		20.827.600.000	8.254.279.925	39,63		6.373.569.712

II. NERACA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR (SETJEN) NERACA

Per, 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2021	31 Desember 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran		150.000.000	-
Persediaan	C.1	5.870.200	3.173.500
Persediaan yang Belum Diregister		27.989.898	
Jumlah Aset Lancar		183.860.098	3.173.500
ASET TETAP			
Tanah	C.2	49.169.024.800	49.256.358.800
Peralatan dan Mesin	C.3	11.352.068.972	11.352.068.972
Gedung dan Bangunan	C.4	22.344.937.836	22.940.815.835
Aset Tetap Lainnya	C.5	96.656.391	96.656.391
Konstruksi Dalam Pengerjaan		173.332.500	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.6	(14.145.834.887)	(13.307.125.240)
Jumlah Aset Tetap		68.990.185.612	70.338.774.758
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.7	-	-
Aset Lain-Lain	C.8	7.150.790.949	7.150.790.949
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.9	(1.832.097.254)	(1.766.045.302)
Jumlah Aset Lainnya		5.318.693.695	5.384.745.647
JUMLAH ASET		74.492.739.405	75.726.693.905
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Pendapatan Diterima di Muka	C.10	-	-
Uang Muka Dari KPPN		150.000.000	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		150.000.000	-
JUMLAH KEWAJIBAN		150.000.000	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.11	74.342.739.405	75.726.693.905
JUMLAH EKUITAS		74.342.739.405	75.726.693.905
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		74.492.739.405	75.726.693.905

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
NUSA TENGGARA TIMUR (SETJEN)
LAPORAN OPERASIONAL**

Untuk Periode Yang Berakhir Pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2021	30 Juni 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	3.484.138	2.696.579
JUMLAH PENDAPATAN		3.484.138	2.696.579
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	5.359.532.435	4.334.165.798
Beban Persediaan	D.3	82.009.900	29.154.600
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.553.222.883	864.702.614
Beban Pemeliharaan	D.5	612.565.850	387.677.500
Beban Perjalanan Dinas	D.6	442.929.759	611.338.950
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.007.499.184	1.053.557.508
JUMLAH BEBAN		9.057.760.011	7.280.596.970
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(9.054.275.873)	(7.277.900.391)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8		
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		37.918.123	15.870.106
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		37.918.123	15.870.106
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		37.918.123	15.870.106
SURPLUS/DEFISIT LO		(9.016.357.750)	(7.262.030.285)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
NUSA TENGGARA TIMUR (SETJEN)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Untuk Periode Yang Berakhir Pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2021	30 Juni 2020
EKUITAS AWAL	E.1	75.726.693.906	75.758.337.351
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(9.016.357.750)	(7.262.030.285)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	899.397.000
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI		-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP/LAINNYA NON REVALUASI		-	899.397.000
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	7.632.403.249	6.356.831.777
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(1.383.954.501)	(5.801.508)
EKUITAS AKHIR	E.6	74.342.739.405	75.752.535.843

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2017-2019 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenkumham adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2017-2019.

Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur (SETJEN) mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur (SETJEN) berkomitmen dengan visi **“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif (PASTI) melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”**

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur (SETJEN). Laporan ini dihasilkan melalui sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi Aset Tetap, Persediaan, Lainnya untuk penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara serta Laporan Manajerial Lainnya. dan Aset

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur (SETJEN) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur (SETJEN) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur (SETJEN) adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

*(*Kementerian Negara/Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing entitas)*

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara / DJKN	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- Tanah
- Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2017 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebesar **Rp.41.402.261,-** atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp.0,-**

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021

Uraian	Tahun Anggaran 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	3.484.138	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL		206	
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL		5.465.000	
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL		32.452.917	

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 dibandingkan Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar **Rp. 22.835.576,-** atau sebesar **122,99%** karena di Tahun Anggaran 2021 terdapat pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu.

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan merupakan setoran sewa rumah dinas yang ada pada Kantor Wilayah.
- Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL merupakan setoran tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Itjen dan BPK berupa kelebihan bayar honor pengajar pada Kegiatan Diklat Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemasarakatan dan Honor Pengajar Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016.
- Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL merupakan setoran tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Itjen terhadap kelebihan pembayaran belanja modal Tahun Anggaran 2020.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2021	Realisasi Tahun Anggaran 2020	Naik (Turun) %
Penerimaan Negara Bukan Pajak	41.402.261	18.566.685	122,99
	-	-	0,00
Jumlah	41.402.261	18.566.685	122,99

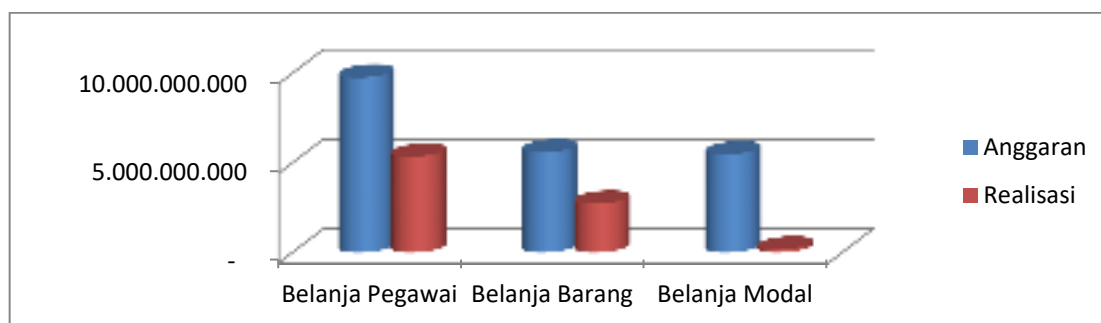
B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp. 8.254.279.925,-** atau **39,63%** dari anggaran belanja sebesar **Rp. 20.827.600.000,-** Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 tersaji sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021

Uraian	Tahun Anggaran 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	9.761.484.000	5.359.532.435	54,90
Belanja Barang	5.588.075.000	2.721.414.990	48,70
Belanja Modal	5.478.041.000	173.332.500	3,16
Total Belanja Kotor	20.827.600.000	8.254.279.925	39,63
Pengembalian Belanja	-	-	
Total Belanja	20.827.600.000	8.254.279.925	39,63

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020, Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar 29,51 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain naiknya pagu belanja pegawai dikarenakan ada penambahan pegawai dan terdapatnya anggaran belanja modal di Tahun 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebagai berikut :

URAIAN	Realisasi Tahun Anggaran 2021	Realisasi Tahun Anggaran 2020	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	5.359.532.435	4.334.165.798	23,66
Belanja Barang	2.721.414.990	1.886.493.664	44,26
Belanja Modal	173.332.500	152.910.250	-
Jumlah	8.254.279.925	6.373.569.712	29,51

B.2.1 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai Kantor Wilayah Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2021 meliputi : Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Tunjangan Suami dan Istri PNS; Belanja Honorarium; Belanja Lembur.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp.5.359.532.435,-** dan **Rp. 4.334.165.798,-**. Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar 6,19% persen dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2020.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 dan 2019

URAIAN	Realisasi Tahun Anggaran 2020	Realisasi Tahun Anggaran 2019	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	3.029.737.100	2.920.757.120	3,73
Belanja Pembulatan Gaji PNS	47.188	50.480	(6,52)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	182.062.310	175.250.820	3,89
Belanja Tunj. Anak PNS	54.851.580	53.005.136	3,48
Belanja Tunj. Struktural PNS	195.545.000	213.200.000	(8,28)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	104.524.000	95.245.000	9,74
Belanja Tunj. PPh PNS	9.818.934	11.064.289	(11,26)
Belanja Tunj. Beras	139.336.080	132.238.920	5,37
Belanja Uang Makan	426.962.000	370.158.000	15,35
Belanja Tunjangan Umum PNS	102.615.000	100.730.000	1,87
Belanja Lembur	90.132.000	16.150.000	458,09
Jumlah Belanja Kotor	4.335.631.192	4.087.849.765	6,06
Pengembalian Belanja Pegawai	1.465.394	6.514.668	(77,51)
Jumlah Belanja	4.334.165.798	4.081.335.097	6,19

B.2.2 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp.1.886.493.664,-** dan **Rp. 1.766.181.905,-**

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2020 mengalami Kenaikan 6,81% dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2019. Hal ini antara lain disebabkan oleh Kenaikan belanja barang non operasional dan belanja jasa sepanjang Tahun 2020

Perbandingan Belanja Barang Tahun Anggaran 2020 dan 2019

URAIAN	Realisasi Tahun Anggaran 2020	Realisasi Tahun Anggaran 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	438.561.200	516.806.000	(15,14)
Belanja Barang Non Operasional	213.749.200	129.051.300	65,63
Belanja Barang Persediaan	19.753.800	38.263.600	(48,37)
Belanja Jasa	212.392.214	131.077.435	62,04
Belanja Pemeliharaan	390.698.300	441.904.070	(11,59)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	611.338.950	509.079.500	20,09
Jumlah Belanja Kotor	1.886.493.664	1.766.181.905	6,81
Pengembalian Belanja	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja	1.886.493.664	1.766.181.905	6,81

B.2.3 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp.152.910.250,-** dan **Rp. 0,-**. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2020 mengalami Kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2019 disebabkan tidak adanya pagu belanja modal di Tahun Anggaran 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2019

URAIAN	Realisasi Tahun Anggaran 2020	Realisasi Tahun Anggaran 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.710.250	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	149.200.000	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	152.910.250	0	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	152.910.250	0	0,00

BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar **Rp. 3.710.250,-** dan **Rp. 0,-**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2020 mengalami Kenaikann sebesar 0% dibandingkan Tahun Anggaran 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020 dan 2019

URAIAN	Realisasi Tahun Anggaran 2020	Realisasi Tahun Anggaran 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.710.250	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	3.710.250	0	0,00

BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar **Rp149.200.000,-** dan **Rp. 0,-**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2020 mengalami Kenaikan sebesar 0% dibandingkan Tahun Anggaran 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020 dan 2019

URAIAN	Realisasi Tahun Anggaran 2019	Realisasi Tahun Anggaran 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	521.932.400	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	521.932.400	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp.5.870.200,-** dan **Rp.3.173.500,-**

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020
Barang Komsumsi	5.095.200	490.000
Bahan Untuk Pemeliharaan	775.000	2.683.500
Jumlah	5.870.200	3.173.500

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang persediaan lainnya/diserahkan ke masyarakat senilai **Rp. 0,-** dalam kondisi rusak dan tidak disajikan dalam Persediaan.

C.2 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp. 49.169.024.800,-** dan **Rp.49.256.358.800,-**.

Terjadi Penurunan Nilai Tanah pada 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT melakukan Transfer Keluar pada Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lembata sebesar **Rp 87.334.000,-** berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Seluas 993 m³

Rincian Tanah

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020
Tanah	49.169.024.800	49.256.358.800
Jumlah	49.169.024.800	49.256.358.800

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	49.256.358.800
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	87.334.000
	0
Saldo per 30 Juni 2020	49.169.024.800

C.3 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp. 11.352.068.972,-** dan **Rp. 11.3532.068.972,-**

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020
Peralatan dan Mesin	11.352.068.972	11.352.068.972
Jumlah	11.352.068.972	11.352.068.972

Saldo Peralatan dan Mesin dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	11.352.068.972
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Reklasifikasi Masuk	
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	
Penghapusan	0
Reklasifikasi Keluar	0
Penghentian dari penggunaan	0
Saldo per 30 Juni 2020	11.352.068.972
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2021	10.284.055.513
Nilai Buku per 30 Juni 2021	1.068.013.459

C.4 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp.22.344.937.836,- dan Rp. 22.940.815.836,-

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020
Gedung dan Bangunan	22.344.937.836	22.940.815.836
Jumlah	22.344.937.836	22.940.815.836

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	22.344.937.836
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Pengembangan Nilai Aset	0
Mutasi kurang:	0
Transfer Keluar	595.878.000
Revaluasi	-
Saldo per 30 Juni 2021	22.940.815.836
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2021	3.861.779.374
Nilai Buku per 30 Juni 2021	19.079.036.462

Mutasi transaksi Pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- Transfer Keluar Rp. 595.878.000

Perincian Transfer Keluar :

- Ke Lapas Kelas III Lembata : 1 Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat

C.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 96.656.391,- dan Rp. 96.656.391,-

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020
Aset Tetap Lainnya	96.656.391	96.656.391
Jumlah	96.656.391	96.656.391

C.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. (14.145.834.887),- dan Rp. (13.307.125.240),-

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(14.145.834.887)	(13.307.125.240)
Jumlah	(14.145.834.887)	(13.307.125.240)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	49.169.024.800	0	49.169.024.800
2	Peralatan dan Mesin	11.352.068.972	10.284.055.513	1.068.013.459
3	Gedung dan Bangunan	22.344.937.836	3.861.779.374	18.483.158.462
4	Aset Tetap Lainnya	96.656.391	0	96.656.391
Akumulasi Penyusutan		82.962.687.999	14.145.834.887	68.816.853.112

C.7 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah **Rp. 7.150.790.949,-** dan **Rp. 7.150.790.949,-**

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020
Aset Lain-lain	7.150.790.949	7.150.790.949
Jumlah	7.150.790.949	7.150.790.949

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	7.150.790.949
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghapusan	
Reklasifikasi Keluar	-
Saldo per 30 Juni 2021	7.150.790.949
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2021	1.832.097.254
Nilai Buku per 30 Juni 2021	5.318.693.695

C.8 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp. (1.832.097.254),-** dan **Rp. (1.766.045.302),-**

C.9 Uang Muka dari KPPN

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp. 150.000.000,-** dan **Rp. 0,-**. Akun Uang Muka dari KPPN merupakan jumlah kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang digunakan untuk membayar belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

C.10 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp. 74.342.739.405,-** dan **Rp. 75.726.693.906,-**. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp. 3.484.138,-** dan **Rp. 2.696.579,-**

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp.5.359.532.435,-** dan **Rp. 4.334.165.798,-**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS).

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp.82.009.900,-** dan **Rp. 29.154.600,-**. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp.1.553.222.883,-** dan **Rp. 864.702.614,-**. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp.387.677.500,-** dan **Rp. 431.245.070,-**. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp.442.929.759,-** dan **Rp. 611.338.950,-**. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp. 1.007.499.184,-** dan **Rp. 1.053.557.508,-**. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

D.8 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	37.918.123	15.870.106,00	138,93
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	37.918.123	15.870.106,00	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp. 75.726.693.906,-** dan **Rp. 75.758.337.351,-**

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah defisit sebesar **Rp. (9.016.357.750),-** dan **Rp. (7.262.030.285),-**. Surplus (defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3 Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan

Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan yaitu penyesuaian Nilai Aset yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**

E.4 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp. 899.397.000,-** diakibatkan karena adanya Koreksi atas Reklasifikasi Rumah Negara dan Selisih Revaluasi Aset. Koreksi nilai persediaan untuk 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-** (nihil)

E.5 Koreksi Nilai Aset Tetap

Koreksi Nilai Aset Tetap merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi Penilaian aset tetap untuk 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 899.397.000,-**.

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp.74.342.739.405,-** dan **Rp. 75.752.535.843,-**

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

- Tidak ada

F.2 Pengungkapan Lain-Lain

- Tidak ada

F.3 Temuan dan Tindak Lanjut Inspektorat Jenderal

Pada Semester I Tahun 2021 Tim Inspektorat Jenderal melakukan Audit Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur atas Pengadaan Barang/Jasa berupa Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 dengan uraian hasil Audit sebagai berikut:

1. Kekurangan Volume Fisik pekerjaan yang terpasang atas pekerjaan pembangunan sumur bor kantor sebesar Rp 5.250.000,-
2. Kekurangan Volume Fisik Pekerjaan yang terpasang atas pekerjaan pembangunan pagar keliling kantor dan denda keterlambatan pembangunan pagar keliling kantor sebesar Rp 13.562.915,82
3. Kelebihan Pembayaran atas Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Pagar Keliling kantor dan pembuatan halaman parkir kantor sebesar Rp 7.475.000,-
4. Kelebihan pembayaran atas jasa konsultan perencanaan pembangunan sumur bor kantor sebesar Rp 4.275.000,-
5. Kelebihan pembayaran atas biaya non personil jasa konsultan pengawas rehabilitasi pagar keliling kantor, pembuatan halaman parkir, dan pembangunan sumur bor kantor sebesar Rp 1.890.000.

Atas temuan hasil audit tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT telah melakukan Tindak lanjut Hasil temuan tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Wilayah telah memerintahkan kepada PPK untuk menarik kelebihan pembayaran kepada CV. Jusaera Jaya dan telah dibayar lunas sebesar Rp5.250.000,00 (Bukti Setor terlampir).
2. Kepala Kantor Wilayah telah memerintahkan kepada PPK untuk menarik kelebihan pembayaran kepada CV. Sola Kristi dan telah dibayar lunas sebesar Rp13.562.915,82 (Bukti Setor terlampir).
3. Kepala Kantor Wilayah telah memerintahkan kepada PPK untuk menarik kelebihan pembayaran kepada CV. Galang Mitra Sejahtera dan telah dibayar lunas sebesar Rp7.475.000,00 (Bukti Setor terlampir).
4. Kantor Wilayah telah memerintahkan kepada PPK untuk menarik kelebihan pembayaran kepada CV. Loka Pratama dan telah dibayar lunas sebesar Rp4.275.000,00 (Bukti Setor terlampir).
5. Kepala Kantor Wilayah telah memerintahkan kepada PPK untuk menarik kelebihan pembayaran kepada CV. Multi Karya Permanen dan telah dibayar lunas sebesar Rp1.890.000,00 (Nota Dinas, Surat Pemberitahuan serta Bukti Setor terlampir).

F.4 Rekening Pemerintah

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Satker SETJEN memiliki 1 Rekening atas nama BPg 039 KANWIL HUKUM DAN HAM NTT 408886 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kupang dengan Nomor Rekening : 0039-01-001039-30-4
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Satker SETJEN tidak memiliki Rekening Bendahara Penerimaan.

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
 POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2021
 TAHUN ANGGARAN 2021

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UAKPB : 408886 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG

Tanggal : 08/08/22 11:53 PM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_k3_sat

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
131111	Tanah	49,169,024,800
132111	Peralatan dan Mesin	11,352,068,972
133111	Gedung dan Bangunan	22,344,937,836
135121	Aset Tetap Lainnya	96,656,391
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	173,332,500
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10,284,055,513)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3,861,779,374)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	7,150,790,949
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(1,832,097,254)
J U M L A H		74,308,879,307

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAKPB : 408886 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG

Tanggal : 08/08/22 11:53 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_persediaan_satker

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	1,220,500
1010301003	Penjepit Kertas	1,123,500
1010301005	Buku Tulis	106,000
1010301006	Ordner Dan Map	1,841,000
1010301010	Alat Perekat	776,000
1010301012	Staples	480,900
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	212,000
1010302001	Kertas HVS	4,538,100
1010302002	Berbagai Kertas	541,000
1010302003	Kertas Cover	124,000
1010302004	Amplop	253,000
1010306010	Batu Baterai	343,750
1010311999	Bahan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	760,000
1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	414,500
1010314002	Obat Padat (Barang Konsumsi)	394,200
1010314005	Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi)	42,000
Jumlah Barang Konsumsi		13,170,450
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305001	Sapu Dan Sikat	472,500
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	775,000
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	1,672,500
1010305012	Pengharum Ruangan	679,500
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		3,599,500
TOTAL		16,769,950

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JUNI 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORGANISASI : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
 KDUAPPAW : 013012400KD BA(013) ES1(01) NUSA TENGGARA TIMUR
 KODE SATKER : 408886 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG

Tgl. Cetak 08/08/2022 11:45 PM
lap_neraca_satker_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	150,000,000	0	150,000,000	0.00
Persediaan	5,860,200	3,173,500	2,686,700	84.66
JUMLAH ASET LANCAR	155,860,200	3,173,500	152,686,700	4,811.30
ASET TETAP				
Tanah	49,169,024,800	49,256,358,800	(87,334,000)	(0.18)
Tanah Belum Diregister	(899,397,000)	0	(899,397,000)	0.00
Peralatan dan Mesin	11,352,068,972	11,352,068,972	0	0.00
Gedung dan Bangunan	22,344,937,836	22,940,815,836	(595,878,000)	(2.60)
Aset Tetap Lainnya	96,656,391	96,656,391	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	173,332,500	0	173,332,500	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(14,145,834,887)	(13,307,125,240)	(838,709,647)	6.30
JUMLAH ASET TETAP	68,090,788,612	70,338,774,759	(2,247,986,147)	(3.20)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	7,150,790,949	7,150,790,949	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1,832,097,254)	(1,766,045,302)	(66,051,952)	3.74
JUMLAH ASET LAINNYA	5,318,693,695	5,384,745,647	(66,051,952)	(1.23)
JUMLAH ASET	73,565,342,507	75,726,693,906	(2,161,351,399)	(2.85)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Hibah Yang Belum Disahkan	(899,397,000)	0	(899,397,000)	0.00
Uang Muka dari KPPN	150,000,000	0	150,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	(749,397,000)	0	(749,397,000)	()
JUMLAH KEWAJIBAN	(749,397,000)	0	(749,397,000)	()
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	74,314,739,507	75,726,693,906	(1,411,954,399)	(1.86)
JUMLAH EKUITAS	74,314,739,507	75,726,693,906	(1,411,954,399)	(1.86)
JUMLAH EKUITAS	74,314,739,507	75,726,693,906	(1,411,954,399)	(1.86)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	73,565,342,507	75,726,693,906	(2,161,351,399)	(2.85)

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JUNI 2021
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 2400
SATUAN KERJA : 408886

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
NUSA TENGGARA TIMUR
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG

Tgl. Cetak 08/08/2022 11:45 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	150,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	5,085,200	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	775,000	0
0.0	131111	Tanah	49,169,024,800	0
0.0	131211	Tanah Belum Diregister	0	899,397,000
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	11,352,068,972	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	22,344,937,836	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	96,656,391	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	173,332,500	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	10,284,055,513
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	3,861,779,374
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	7,150,790,949	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	1,832,097,254
0.0	218211	Hibah Langsung yang belum disahkan	899,397,000	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	150,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	8,254,279,925
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	41,402,261	0
0.0	313211	Transfer Keluar	580,474,415	0
0.0	391111	Ekuitas	0	75,726,693,906
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	899,397,000	0
0.0	391133	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	0	899,397,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,484,138
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	206
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,465,000
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	32,452,917
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,745,279,220	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	62,467	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	233,089,980	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	67,668,744	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	258,020,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	165,608,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	23,734,784	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	200,748,240	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	497,079,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	120,050,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	555,000
3.0	512211	Beban Uang Lembur	48,747,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	370,575,579	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER JUNI 2021
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
 UNIT ORGANISASI : 01
 WILAYAH/PROVINSI : 2400
 SATUAN KERJA : 408886

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 SEKRETARIAT JENDERAL
 NUSA TENGGARA TIMUR
 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG

Tgl. Cetak 08/08/2022 11:45 PM
 lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,495,900	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	51,780,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	7,956,710	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	44,787,500	0
3.0	521211	Beban Bahan	90,883,900	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	2,400,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	10,095,455	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	98,397,839	0
3.0	522141	Beban Sewa	846,000,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	11,700,000	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	11,150,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	308,614,898	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	316,388,450	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	435,579,759	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,350,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	467,427,346	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	474,019,886	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	66,051,952	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	82,019,900	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	15,552,400	0
JUMLAH			101,949,657,233	101,949,657,233

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JUNI 2021
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 2400
SATUAN KERJA : 408886

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
NUSA TENGGARA TIMUR
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG

Tgl. Cetak 08/08/2022 11:45 PM
lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	12,573,320,075	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	41,402,261	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	6,608,820,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	108,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	412,174,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	119,324,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	452,480,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	313,484,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	41,114,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	353,164,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	1,168,797,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	200,130,000
2.0	512211	Allotment Belanja Uang Lembur	0	91,889,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	756,072,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	25,000,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	209,520,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	246,486,000
2.0	521131	Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	70,000,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	298,923,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	54,440,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	74,114,000
2.0	521241	Allotment Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	289,500,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	170,706,000
2.0	521841	Allotment Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	3,000,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	216,000,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	934,844,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	29,700,000
2.0	522192	Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	11,400,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	431,150,000
2.0	523112	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	52,000,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	555,360,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	1,112,610,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	47,250,000
2.0	533121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	5,478,041,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,484,138
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	206
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,465,000

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JUNI 2021
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 2400
SATUAN KERJA : 408886

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
NUSA TENGGARA TIMUR
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG

Tgl. Cetak 08/08/2022 11:45 PM
lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	32,452,917
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3,745,279,220	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	62,467	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	233,089,980	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	67,668,744	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	258,020,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	165,608,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	23,734,784	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	200,748,240	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	497,079,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	120,050,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	555,000
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	48,747,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	370,575,579	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,495,900	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	51,780,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	7,956,710	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	44,787,500	0
3.0	521211	Belanja Bahan	90,883,900	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,400,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	10,095,455	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	100,259,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	98,397,839	0
3.0	522141	Belanja Sewa	846,000,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	11,700,000	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	11,150,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	308,614,898	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	316,388,450	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	435,579,759	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,350,000	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	173,332,500	0
JUMLAH			20,869,557,261	20,869,557,261

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01
SATUAN KERJA : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG 408886

Kode Lap : LRA.F.S
Tanggal : 08/08/22 11:46 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --

NO	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	41,402,261	41,402,261	0	0	18,566,685	18,566,685	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	41,402,261	41,402,261	0	0	18,566,685	18,566,685	0
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	9,761,484,000	5,359,532,435	(4,401,951,565)	55	8,608,679,000	4,334,165,798	(4,274,513,202)	50
	BELANJA BARANG	5,588,075,000	2,721,414,990	(2,866,660,010)	49	4,547,453,000	1,886,493,664	(2,660,959,336)	41
	BELANJA MODAL	5,478,041,000	173,332,500	(5,304,708,500)	3	1,931,829,000	152,910,250	(1,778,918,750)	8
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	20,827,600,000	8,254,279,925	(12,573,320,075)	40	15,087,961,000	6,373,569,712	(8,714,391,288)	40
C	PEMBIAYAAN				0				0

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ESELON I : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : 2400 NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN KERJA : 408886 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 08/08/22 11:46
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_satker --
Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,484,138	2,696,579	787,559	29.206
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3,484,138	2,696,579	787,559	29.206
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	3,484,138	2,696,579	787,559	29.206
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	5,359,532,435	4,334,165,798	1,025,366,637	23.658
Beban Persediaan	82,019,900	29,154,600	52,865,300	181.327
Beban Barang dan Jasa	1,553,222,883	864,702,614	688,520,269	79.625
Beban Pemeliharaan	640,555,748	387,677,500	252,878,248	65.229
Beban Perjalanan Dinas	442,929,759	611,338,950	(168,409,191)	(27.548)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 ESELON I : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
 WILAYAH/PROVINSI : 2400 NUSA TENGGARA TIMUR
 SATUAN KERJA : 408886 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG
 JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LO.SAT
 Tanggal : 08/08/22 11:46
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lo_satker --
 Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,007,499,184	1,053,557,508	(46,058,324)	(4.372)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	9,085,759,909	7,280,596,970	1,805,162,939	24.794
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(9,082,275,771)	(7,277,900,391)	(1,804,375,380)	24.793
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	37,918,123	15,870,106	22,048,017	138.928
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	37,918,123	15,870,106	22,048,017	138.928
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	37,918,123	15,870,106	22,048,017	138.928
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(9,044,357,648)	(7,262,030,285)	(1,782,327,363)	24.543
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(9,044,357,648)	(7,262,030,285)	(1,782,327,363)	24.543

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ESELON I : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : 2400 NUSA TENGGARA TIMUR
JENIS SATUAN KERJA : KD
SATUAN KERJA : 408886 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG

Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 08/08/22 11:46 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker --rekon17

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	75,726,693,906	75,758,337,351	(31,643,445)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(9,044,357,648)	(7,262,030,285)	(1,782,327,363)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(899,397,000)	899,397,000	(1,798,794,000)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(899,397,000)	899,397,000	(1,798,794,000)	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	8,531,800,249	6,356,831,777	2,174,968,472	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,411,954,399)	(5,801,508)	(1,406,152,891)	-
EKUITAS AKHIR	74,314,739,507	75,752,535,843	(1,437,796,336)	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
 MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
 TINGKAT SATUAN KERJA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021
 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 ESELON I : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
 WILAYAH/PROVINSI : 2400 NUSA TENGGARA TIMUR
 SATUAN KERJA : 408886 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG

Kode Lap : LRA.P.E1.1
 Tanggal : 08/08/22 11:46
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,484,138	0	3,484,138	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	3,484,138	0	3,484,138	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	206	0	206	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,465,000	0	5,465,000	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	32,452,917	0	32,452,917	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	37,918,123	0	37,918,123	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	41,402,261	0	41,402,261	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	41,402,261	0	41,402,261	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 2400
SATUAN KERJA : 408886
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
BA(013) ES1(01) NUSA TENGGARA TIMUR
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 08/08/22 11:47
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid --
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	36,000,000	70,000,000	44,787,500	0	44,787,500	63.98	25,212,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	36,000,000	70,000,000	44,787,500	0	44,787,500	63.98	25,212,500
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	289,500,000	289,500,000	0	0	0	0	289,500,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	289,500,000	289,500,000	0	0	0	0	289,500,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	48,400,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	48,400,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	11,400,000	11,150,000	0	11,150,000	97.81	250,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	0	11,400,000	11,150,000	0	11,150,000	97.81	250,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	373,900,000	373,900,000	55,937,500	0	55,937,500	14.96	317,962,500
	JUMLAH BELANJA	373,900,000	373,900,000	55,937,500	0	55,937,500	14.96	317,962,500

**RINCIAN REALISASI BELANJA DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19
SEMESTER I TA 2021**

Satuan Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT (408886)

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE AKUN BELANJA	NO SP2D	JUMLAH	RINCIAN BELANJA	KETERANGAN	LANGKAH-LANGKAH MITIGASI
a	b	c	d	e	f	g	h	i
sudah jelas	sudah jelas	sudah jelas	diisi dengan kode akun belanja yang telah terbit SP2D dengan menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19 ataupun tidak	diisi dengan nomor SP2D atas belanja di kolom d	diisi dengan nilai belanja yang ada di SP2D	diisi dengan nama kegiatan atau jenis barang yang dibelanjakan	diisi dengan alasan penggunaan akun belanja yang tidak sesuai dalam rangka penanganan pandemi COVID-19	diisi dengan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan dalam rangka menanggulangi potensi kesalahan penggunaan akun belanja
1	408886	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT	521131	210391301000485	2.572.600	Vitamin		
			521131	210391301004601	16.100.000	Masker		
			521131	210391301013505	2.714.900	Hand Sanitizer		
			521131	210391303004759	7.800.000	Lisensi ID Zoom Bulan Mei & Juni		
			521131	210391303002478	7.800.000	Lisensi ID Zoom Bulan Maret & April		
			521131	210391303000460	7.800.000	Lisensi ID Zoom Bulan Januari & Februari		
			522192	210391301005638	7.895.000	Biaya Swab Perjadin		
			522192	210391301010243	1.595.000	Biaya Swab Perjadin		
			522192	210391301011534	850.000	Biaya Swab Perjadin		
			522192	210391301013505	400.000	Biaya Swab Perjadin		
			522192	210391301014969	410.000	Biaya Swab Perjadin		
TOTAL					Rp 55.937.500			

Mengetahui,
Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN

Yohanis Bely, SH
NIP. 19780128 200604 1 001